

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Latif dan H. Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Sinar Gravika. Jakarta. 2011
- Abu Daud Busroh. H. Abubakar Busroh. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*.
Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.
- Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*.
Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.
PT Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta. 2002
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence)*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Achmad Ruslan. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia*, Rangka Uducation. Yogyakarta.
2011.
- Aminuddin Ilmar. *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan (Bestuursrecht.
Government Law)*. Makassar: UPT Unhas Press. 2021.
- Aminuddin Ilmar. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Phinatama
Media. Makassar. 2014.
- H.R Otje Salman Soemadiningrat. *Filsafat Hukum (Perkembangan &
Dinamika Masalah)*. PT Refika Aditama. Bandung. 2012.

- H S Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
- H. Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2020.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.
- Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung. 1994.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. cetakan ketiga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2014.
- Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers Jakarta. 2013.
- Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Refika Aditama. Bandung. 2012.

- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta. 2013.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pt Sastra Hudaya. Jakarta. 1983.
- Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers. Depok. 2017.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2012.
- Ni'matul Huda. *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI): Yogyakarta. Februari 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2005.
- Putera Astomo. *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok. 2018.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Sabian Usman. *Dasar-dasar Sosiologi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remaja Karya. Bandung. 1985.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2010.

Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.

Jurnal-Jurnal:

Ach Faisol Triwijaya et al. Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 1 Nomor 2. November 2020.

Anggian Cassilas. Kekuatan nilai Pancasila sebagai ideologi negara untuk keberlangsungan hidup bangsa. *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 4 Nomor 2. Desember 2021.

Any Ismayawati, Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Yudisia*. Volume 8 Nomor 1. Juni. 2017.

Amalia Diamantina. *et.al.* Kajian Yuridis materi Muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Terhadap nilai-nilai Pancasila. *Jurnal. Pancasila: Jurnal KeIndonesiaan*. Volume 01 Nomor 10. April. 2021.

Ario Putra. Interpretation of Human Rights in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia. *Jurnal HAM*. Vol 13. Nomor 1 April 2022

Burhanuddin. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Juridica*. Volume 2 No. 1. November. 2020.

- Dani Pinasang. Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol. XX, No. 3. April-Juni. 2012.
- Deny Noer Wahid. Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Jurnal Pancasila: Jurnal KeIndonesiaan*. Volume 08 Nomor 01. April, 2023.
- Dora Nina Lumban Gaol. Badan Pengkajian Ideologi Pancasila dalam Perspektif Hukum tata Negara. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. Vol 1 Nomor 2. Article 4.
- Fais Yonas Bo'a. Pancasila sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*. Volume 15 Nomor 1. Maret. 2018.
- Fendi Setyawan. Institusionalisasi nilai Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 18 Nomor 2. Juni. 2021.
- Indah Dewi Megasari. Implementasi Nilai-Nilai filosofis Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB.
- Kornelius Benuf. Politik Hukum Legislatur dan Ideologi Pancasila. *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 5 Edisi 1. September. 2018.
- Lusy Liany. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan hukum nasional (studi kasus perda provinsi. kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Adil: Jurnal Hukum* Volume 11 Nomor 2. 2020.

- Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang. *Jurnal SASI*. Volume 26 Nomor 3 Juli-September. 2020.
- Maria Madalina. *et.al.* Penegakan Hukum Progresif dalam Perkara Judicial Review: Telaah Pancasila Sebagai Batu Uji Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Majelis*. edisi 04, Agustus. 2020.
- Mohamad Roky Huzaeni. Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pancasila: Jurnal KelIndonesiaan* Volume 02 Nomor 01. April. 2022.
- Oksep Adhayanto. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2. Februari-Juli. 2015.
- Otman Annafie. Kelembagaan Otonomi Khusus (OTSUS) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Volume 3 Nomor 2. Juni. 2016.
- Priyo Hutomo. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Hukum Per masyarakatan Militer. *Jurnal legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Volume 1 Nomor 1 Maret. 2021.
- Pujiyono Suwandi dan Putri Anjelina. Institusionalisasi nilai-nilai Pancasila Melalui Penyusunan Dokumen Nasional Oleh Forum Konsultasi

Pimpinan Lembaga Tinggi Negara. *Jurnal Majelis*. Edisi 04. Agustus. 2020.

Redyanto Sidi. et al. *Staatfundamentalnorm* (Pancasila) sebagai Bahan Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal iuris studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 2 Nomor 3. Oktober. 2021.

Sulistiyani Eka Lestari. Pancasila Dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Negara dan Keadilan*. Volume 7 Nomor 2. Agustus. 2018.

Sunarno Danusastro. Perlukah Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Ditegaskan Dalam Pasal UUD 1945 Berikut Sila-Silanya. *Jurnal Majelis*. Edisi 04. Agustus. 2020.

Zuhri Saifuddin. Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara. *Jurnal Amnesti: Jurnal Hukum*. Vol 1 Nomor 2. 2019.

Zulkifli Aspan, Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 Januari. 2020.

Tesis dan lain-lain:

A. Hamid S. Attamimi. *Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, (Makalah yang disampaikan pada latihan keahlian perundang-undangan dalam penataran tentang pendidikan hukum klinis bagi dosen-dosen Fakultas Hukum Negeri yang diselenggarakan oleh konsorsium Ilmu Hukum DEPDIKBUD),

Jakarta. 12-13 April 1993. dan ditulis ulang oleh Ahmad Ruslan dalam bukunya *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI. 2019).

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan akhir kelompok kerja analisis dan evaluasi hukum terkait penguatan ideologi Pancasila*. Jakarta, November 2019

Bpip.go.id

Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002.

Deppa Ringgi. Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Satwa Langka Menurut CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species*). Tesis Hukum Internasional Universitas Hasanuddin. 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembinaan_Ideologi_Pancasila

[https://nasional.tempo.co/read/1642370/jejaring-panca-mandala-deklarasi-bumikan-Pancasila-di-benua-etam,](https://nasional.tempo.co/read/1642370/jejaring-panca-mandala-deklarasi-bumikan-Pancasila-di-benua-etam)

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6078/2/T2_932012013_BAB%20%20II.pdf

[http://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf,](http://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf)

<https://www.rri.co.id/daerah/186621/bpip-bentuk-jejaring-panca-mandala-se-babel>

Isak Samuel Kijne Mansawan. Efektivitas implementasi Perpres No. 17 tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Mempercepat Pembangunan di Provinsi Papua Barat. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Jimly Asshiddiqie, Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press. Jakarta, 2004.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Jakarta: 2007).

Stephen P. Robbins. Organization Theory: Structure Designs and Applications. 3rd edition. Prentice Hall. New Jersey. 1990. dalam Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006.



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI
DAN PENGAWASAN REGULASI

JALAN VETERAN III NO. 2 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3505200
Situs Web: <http://bPIP.go.id> Alamat Surel: persuratan@bPIP.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR 51/DH/03/2023/D2.01

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib S. Ag., M. Ag.
Jabatan : Direktur Analisis dan Penyelarasan ke deputian Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anshari Ahmad Syah Hanafi
NIM : 012202030
Status : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

telah melakukan penelitian di kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sebagai bahan penulisan tugas akhir (*thesis*) dengan judul "Efektivitas Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Maret 2023
Direktur Analisis dan Penyelarasan,



Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.